

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

Efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah digunakan untuk melihat perbedaan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa didapat oleh pemerintah daerah. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Penerimaan}}{\text{Target Jumlah Penerimaan}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk menilai pajak daerah tersebut memiliki kriteria Efektivitas maka dapat menggunakan teori Mahmudi (2011;171) yakni, tingkat efektivitas penerimaan daerah jika dikatakan sangat efektivitas jika rasio yang diperoleh >100%; tingkat efektifitas dikatakan efektif jika rasio yang diperoleh 100%; tingkat efektifitas dikatakan cukup efektif jika rasio yang diperoleh 90%-99%; tingkat efektifitas dikatakan kurang efektif jika rasio yang diperoleh sebesar 75%-89%; tingkat efektifitas dikatakan tidak efektif jika rasio yang diperoleh <75%.

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka dapat dilakukan perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah Kota

Kupang tahun 2011-2015 dalam gambar grafik di bawah ini dengan kriteria penilaian tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tingkat Efektivitas Jenis-jenis Pajak Daerah
Kota Kupang Tahun
2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Uraian	Efektifitas				
Pendapatan Asli Daerah	92.63%	107.64%	103.39%	111.52%	116.28%
Pajak Daerah	110.26%	112.62%	105.52%	120.20%	130.92%
Pajak Hotel	102.75%	119.96%	84.83%	110.78%	140.39%
Pajak Restoran	99.58%	106.36%	121.95%	155.14%	150.43%
Pajak Hiburan	126.74%	113.83%	79.39%	80.77%	113.58%
Pajak Reklame	91.75%	107.20%	84.15%	130.05%	117.53%
Pajak Penerangan Jalan	112.47%	109.10%	105.77%	115.96%	128.51%
Pajak Pengambilan Galian C	40.54%	123.62%	136.95%	89.48%	118.78%
Pajak Parkir	170.96%	91.78%	67.15%	69.30%	131.43%
Pajak BPHTB	129.29%	121.89%	120.19%	128.95%	138.26%
Pajak Air Bawah Tanah	-	-	56.39%	115.32%	130.27%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	118.28%	116.63%

Sumber data : data diolah

Perhitungan analisis tingkat efektivitas yang digambarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak Kota Kupang berfluktuasi, namun dilihat pada tabel 5.1 pajak daerah Kota Kupang tahun 2011-2015 masuk dalam kriteria sangat efektif tiap tahunnya. Tinggi rendahnya tingkat efektivitas atau realisasi penerimaan pajak daerah disebabkan oleh realisasi dari komponen-komponen pajak daerah itu sendiri.

Pajak Hotel memiliki tingkat efektivitas yang berfluktuasi. berdasarkan tabel 5.1 pajak hotel masuk dalam kriteria sangat efektif, namun pada tahun 2013 pajak hotel mengalami penurunan 84,83% dan masuk

dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pajak hotel menurun cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 84.83% (kurang efektif) karena sebagian besar realisasi komponen pajak hotel tidak mencapai target.

Hasil perhitungan pada tabel 5.1 Pajak restoran juga memiliki efektivitas yang berfluktuasi dan cenderung meningkat, ditahun 2011 pajak restoran masuk dalam kriteria efektif dengan nilai sebesar 99.58%, ditahun 2012-2015 tingkat efektivitas meningkat dan masuk dalam kriteria sangat efektif karena $<100\%$.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5.1 menunjukan bahwa pajak hiburan ditahun 2011 memiliki tingkat efektivitas yang paling tinggi dengan nilai 126.47% kriteria sangat efektif, namun ditahun 2012 mengalami penurunan dengan nilai 113,83% kurang efektif dan tahun 2013 masi dalam kriteria kurang efektif namun nilai naik menjadi 80.77%, pada tahun 2015 naik lagi menjadi 113,58% dengan kriteria Sangat efektif.

Demikian juga pada pajak reklame yang memiliki tingkat efektivitas berfluktuasi, ditahun 2011 memiliki tingkat efektifitas 91.75% cukup efektif namu ditahun 2012 naik menjadi 107,20% dan masuk dalam kriteria sangat efektif, tetapi pada tahun 2013 menurun drastis dengan penilaian kurang efektif dengan nilai 84,15%, ditahun 2014 dan 2015 naik lagi $>100\%$ dengan kriteria sangat efektif.

Pajak penerangan jalan pada tahun 2011-2015 juga memiliki tingkat efektivitas dengan kriteria efektivitas sangat efektif, walaupun tingkat

efektivitas cenderung menurun. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi pada tahun 2015 dengan tingkat efektivitas sebesar 128,51% yaitu sangat efektif, sedangkan tingkat efektivitas terendah berada ditahun tahun 2013 dengan tingkat efektivitas sebesar 105.77% sangat efektif. Pajak penerangan jalan dipungut oleh PT. PLN (persero) dari masyarakat yang membayar beban listrik yang didalamnya telah terakumulasi dengan pajak penerangan jalan, sehingga jika realisasi pajak penerangan akan terus meningkat setiap tahun karena adanya pemakaian dan pemasangan baru jaringan listrik oleh masyarakat.

Pajak pengambilan bahan galian golongan c juga umumnya memiliki tingkat efektivitas yang cenderung meningkat setiap tahunnya, ditahun 2011 tingkat efektivitas sebesar 40.54% tidak efektif, disebabkan oleh realisasi beberapa komponen tidak mencapai target, pada tahun 2012 dan 2013 tingkat efektivitas meningkat dengan nilai 123,62% dan 136, 51% dengan kriteria sangat efektif.

Hasil pada grafik 5.1 terlihat bahwa pajak pengambilan bahan galian golongan c merupakan jenis pajak yang masih di pungut oleh pemerintah Kota Kupang karena pajak pengambilan bahan galian golongan c masih sangat potensial. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Kupang berpegang teguh pada salah satu arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu optimalisasi pemanfaatan aset/kekayaan daerah harus berorientasi pada peningkatan PAD yang mengacu pada peraturan lama yang mengatur tentang pajak daerah yakni undang-undang nomor 34 tahun 2000, sedangkan

perubahan peraturan yang mengatur tentang pajak daerah yakni undang-undang nomor 28 Tahun 2009 untuk jenis pajak ini tidak termasuk dalam daftar jenis-jenis pajak kota, namun dapat dipungut apabila memiliki potensi yang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah (Siahaan:2013:65).

Hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak parkir pada tabel 5.1 menunjukkan efektivitas pada tahun 2011 paling tinggi dan masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2012 menurun mencapai 91,78% dengan kriteria cukup efektif, pada tahun 2013 dan 2014, menurun sampai pada kriteria tidak efektif dengan nilainya <75%, namun pada tahun 2015 naik menjadi 131,43% dengan kriteria sangat efektif.

Pajak BPHTB memiliki nilai efektivitas yang cenderung menurun, dimana jenis pajak BPHTB tidak memiliki nilai efektivitas pada tahun 2010, hal ini disebabkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sehingga jenis pajak BPHTB tersebut belum mulai dipungut, kemudian pada tahun 2011-2015 memiliki tingkat efektivitas sangat Efektif, namun berfluktuasi.

Hasil perhitungan pajak air bawah tanah, dimana pada tahun 2010-2012 tidak memiliki nilai efektivitas, karena belum dipungut oleh pemerintah Kota Kupang, padahal perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 yang memuat tentang penambahan satu jenis pajak yaitu pajak air bawah tanah, yang

sebelumnya merupakan pajak provinsi dan berlaku paling lama satu tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut (Siahaan, 2013:59-63) sehingga pada tahun 2013 baru memiliki tingkat efektivitas sebesar 56.39% tidak efektif, namun pada tahun 2014 naik menjadi 115.32% dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2015 juga meningkat menjadi 130,27% sangat efektif.

Hasil perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2011-2013 tidak memiliki nilai efektivita karena belum dipungut, baru dipungut pada tahun 2014 dikarenakan baru dikeluarkan peraturan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pada tahun 2014 tingkat efektivitas sangat efektif dengan nilai 118,27%, pada tahun 2015 tingkat efektivitas menurun, namun masi masuk dalam kriteria sangat efektif dengan nilai 116,63 %.

5.2 Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2015

Analisis pertumbuhan bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai. Analisis mengenai pertumbuhan pajak daerah digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dari periode ke periode.

Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi Pemerintah Kota Kupang, sehingga meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2004:272) untuk menghitung pertumbuhan dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Dimana:

R=Pertumbuhan

P_n = Realisasi penerimaan pada tahun ke-n

P_o = Realisasi penerimaan pada tahun awal sebelumnya

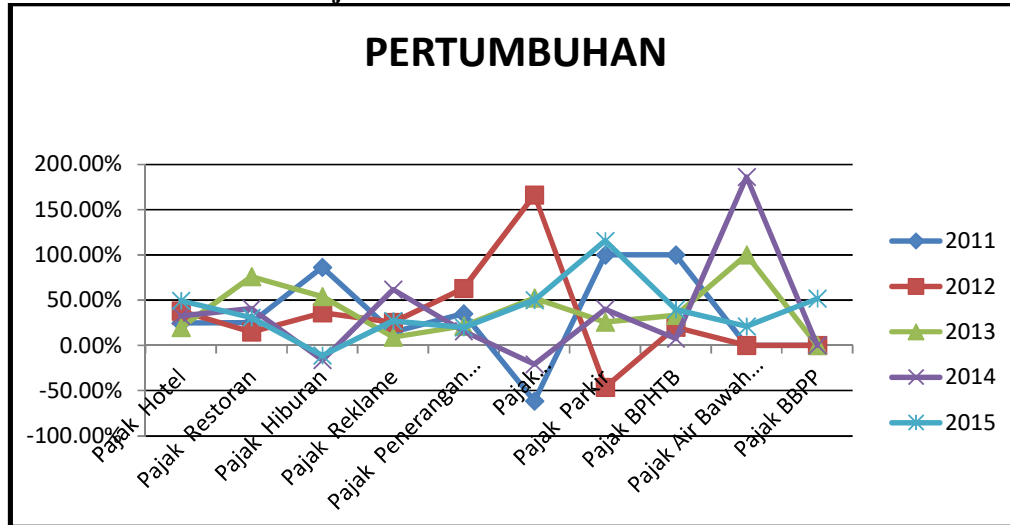
Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dilakukan perhitungan tingkat pertumbuhan pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2011-2015 dapat dilihat hasil perhitungan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Perhitungan Pertumbuhan
Pajak Daerah Tahun 2011-2015

No	Nama Jenis Pajak	Pertumbuhan					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	24,87%	38,09%	19,78%	32,62%	49,52%	32,98%
2	Pajak Restoran	25,05%	14,77%	76,11%	40,87%	30,61%	37,48%
3	Pajak Hiburan	86,20%	36,07%	54,08%	-16,16%	-11,30%	29,78%
4	Pajak Reklame	14,81%	25,38%	9,18%	61,84%	26,92%	27,63%
5	Pajak Penerangan Jalan	34,98%	63,10%	21,35%	15,72%	19,58%	30,95%
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-61,36%	166,22%	52,47%	-20,99%	49,88%	37,24%
7	Pajak Parkir	100,00%	-46,31%	25,75%	40,17%	115,79%	47,08%
8	Pajak BPHTB	100,00%	20,21%	33,40%	7,29%	39,85%	40,15%
9	Pajak Air Bawah Tanah	0,00%	0,00%	100,00%	186,33%	21,03%	61,47%
10	Pajak BBPP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,70%	10,34%
	Rata-rata	32,46%	31,75%	39,21%	34,77%	39,36%	35,77%

Sumber :data diolah

Grafik. 5.1
Rekapitulasi Perhitungan Pertumbuhan
Pajak Daerah Tahun 2011-2015



Sumber data diolah

Berdasarkan perhitungan hasil analisis yang ditampilkan pada tabel grafik diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Kupang setiap tahun menunjukkan *trend* pertumbuhan yang berfluktuasi, dimana penerimaan pajak daerah yang memiliki *Trend* pertumbuhan rata-rata yang paling tinggi berada pada pajak Air Bawah Tanah, sedangkan penerimaan pajak daerah yang memiliki *trend* pertumbuhan yang paling rendah atau lambat terjadi pada pajak BBPP yaitu sebesar 12,93%. Pajak Hotel mengalami pertumbuhan yang fluktuasi dan cenderung menurun namun pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 49,52%. Pajak restoran mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 76,11%, pertumbuhan terendahnya yaitu sebesar 25,05% pada tahun 2011. Pajak hiburan mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 86,20% dan terjadi penurunan

pada tahun 2014 dan 2015. Untuk pajak reklame mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 61,84%.

Pertumbuhan tertinggi untuk item pajak lainnya yaitu pajak penerangan jalan 63,10%, pengambilan bahan galian c 166,22%, pajak parkir 115,79, pajak BPHTP 100 % dan pajak air bawah tanah 186,33%. Secara keseluruhan setiap item pajak mengalami pertumbuhan yang fluktuasi dan cenderung menurun selama 5 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada konsistensi dari pihak pemerintah kota dalam mengelola penerimaan pajak. Dengan komitmen yang baik maka penerimaan pajak dapat dimaksimalkan sehingga pada akhirnya akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak itu sendiri.

5.3 Kontribusi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2015

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013:2) Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3)

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

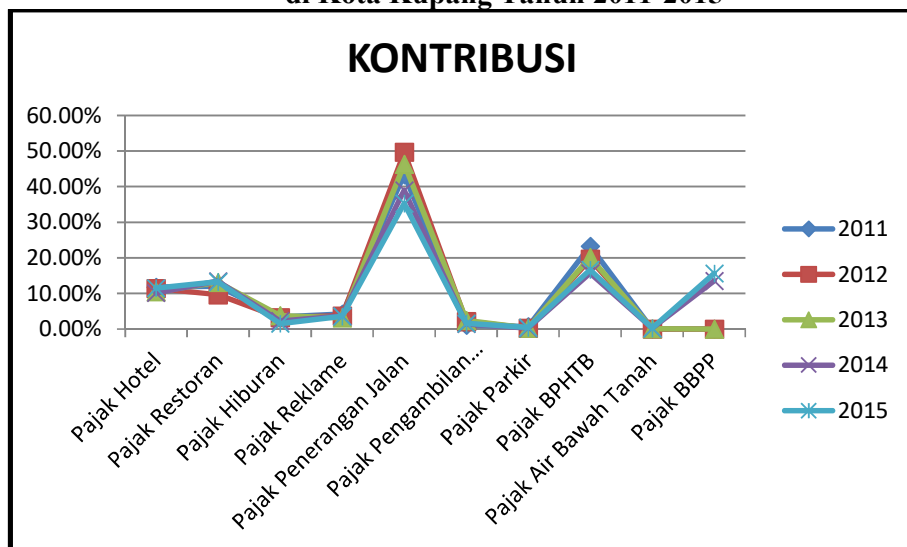
Berdasarkan rumusan di atas maka dapat dilakukan perhitungan Kontribusi pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Kontribusi Pajak setiap Sektor Pajak Daerah
di Kota Kupang Tahun 2011-2015

No	Jenis Pajak	KONTRIBUSI					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	11,80%	11,46%	10,53%	10,17%	11,52%	11,10%
2	Pajak Restoran	12,03%	9,71%	13,11%	13,45%	13,32%	12,32%
3	Pajak Hiburan	3,43%	3,28%	3,87%	2,36%	1,59%	2,91%
4	Pajak Reklame	4,24%	3,74%	3,13%	3,69%	3,55%	3,67%
5	Pajak Penerangan Jalan	43,33%	49,70%	46,27%	38,98%	35,33%	42,72%
6	Pajak Pengambilan Galian C	1,15%	2,15%	2,52%	1,45%	1,65%	1,78%
7	Pajak Parkir	0,74%	0,28%	0,27%	0,27%	0,45%	0,40%
8	Pajak BPHTB	23,30%	19,69%	20,15%	15,74%	16,69%	19,11%
9	Pajak Air Bawah Tanah	0,00%	0,00%	0,14%	0,29%	0,26%	0,14%
10	Pajak BBPP	0,00%	0,00%	0,00%	13,60%	15,64%	5,85%
Rata-rata		21,67%	24,85%	23,14%	19,63%	17,80%	21,43%

Sumber data : data diolah

Grafik 5.2
Kontribusi Pajak Setiap Sektor Pajak Daerah
di Kota Kupang Tahun 2011-2015



Sumber data : data diolah

Berdasarkan data tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa kontribusi setiap jenis pajak beragam. Dari tahun ke tahun kontribusi setiap jenis pajak mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu pada pajak penerangan jalan sebesar 49,70% dan Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2013 pada pajak air bawah tanah sebesar 0,14%. Secara

keseluruhan terlihat bahwa kontribusi setiap item pajak berbeda-beda. Dari setiap item pajak penerangan jalan merupakan pajak yang memiliki kontribusi paling besar setiap tahunnya. Namun ada beberapa jenis pajak yaitu pajak air bawah tanah, pajak BBPP yang kontribusinya 0%. Untuk PBB perdesaan dan perkotaan penerimaannya 0% disebabkan sebelum tahun 2013 masih menjadi kewenangan pusat sehingga daerah belum mempunyai kewenangan untuk memungut pajak tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ditahun 2011 sampai dengan tahun 2013 belum ada penerimaan atas pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

5.4 Potensi Beberapa Jenis Pajak Daerah Yang Bersumber Pada Unggulan, Potensial, Berkembang dan Terbelakang di Kota Kupang

Pemetaan potensi PAD merupakan teknik pengelompokan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sumber tertentu terhadap total PAD suatu daerah. Dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui sumber pendapatan pajak daerah agar dapat dikelompokkan manakah yang termasuk dalam kategori Sumber Unggul, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang dalam pendapatan pajak daerah tahun 2011-2015. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan jenis pajak kedalam matriks yang tertera pada lampiran dan pemetaan kedalam analisis tripologi klassen.

5.4.1 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2011

Berdasarkan hasil analaisis Potensi Pajak Daerah Kota Kupang didapatkan hasil pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan Dengan Tipologi Klassen, Tahun 2011

POTENSI		KEMAMPUAN MENGELOLAH	
Tinggi	KUADRAN I Sektor Unggulan (prima)	KUADRAN II Sektor Berkembang	
	Pajak Penerangan Jalan		
Rendah	KUADRAN III Sektor Potensial	KUADRAN IV Sektor Terbelakang	
	Pajak Hiburan Pajak Parkir	Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak BPHTB	
	Tinggi	Rendah	

Dari hasil tabel 5.4 yang masuk dalam kuadran I (sektor unggulan) dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan penggelolaan yang tinggi adalah Pajak Penerangan Jalan. Dalam Kuadran II (sektor berkembang) dimana memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan mengelola rendah ditahun 2011 tidak ada pajak yang masuk, sedangkan dalam Kuadran III (sektor potensial) adimana pemerintah memiliki potensi yang rendah namun memiliki kemampuan untuk mengelola tinggi adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Dan Kuadran IV(sektor terbelakang) adalah Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Pengambilan Galian C dimana sumber pajak memiliki potensi dan kemampuan mengelola rendah.

5.4.2 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang

Tahun 2012

Berdasarkan hasil analisis Potensi Pajak Daerah Kota Kupang Pemetaan potensi pajak daerah Kota Kupang tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan dengan Tipologi Klassen Tahun 2012

		POTENSI	KEMAMPUAN MENGELOLAH
Tinggi		KUADRAN I Sektor Unggulan (prima)	KUADRAN II Sektor Berkembang
		Pajak Penerangan Jalan	
Rendah		KUADRAN III Sektor Potensial	KUADRAN IV Sektor Terbelakang
		Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Parkir Pajak BPHTB
		Tinggi	Rendah

Hasil pemetaan potensi pada tahu 2012 untuk Kuadran I (sektor unggulan) masi sama dengan tahun 2011 yaitu Pajak Penerangan jalan yang memiliki potensi dan kemampuan mengelola tinggi. Yang temaksuk dalam Kuadran II (sektor berkembang) dimana memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan mengelola rendah juga belum

ada pajak yang masuk di tahun 2012. dalam Kuadran III (sektor potensial) adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian C. Dan Kuadran IV (sektor terbelakang) adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak BPHTB, dan Pajak Parkir dimana sumber pajak memiliki potensi dan kemampuan mengelola rendah.

5.4.3 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis perhitungan pemetaan potensi pajak pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6
Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan Dengan Tipologi Klassen, Tahun 2013

POTENSI KEMAMPUAN MENGELOLAH

		KUADRAN I Sektor Unggulan (prima)	KUADRAN II Sektor Berkembang
Tinggi			Pajak Penerangan Jalan
		KUADRAN III Sektor Potensial	KUADRAN IV Sektor Terbelakang
Rendah		Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Hotel Pajak Reklame Pajak Parkir Pajak BPHTB
	Tinggi		Rendah

Di tahun 2013 sektor yang paling Unggul atau Prima yang masuk dalam kuadran I tidak ada, di tahun ini pajak penerangan jalan berpindah pada Kuadran II (sektor berkembang) dimana memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan mengelola rendah. Kuadran III (sektor potensial) adalah Pajak Retoran, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Galian C dan Pajak Air Bawah Tanah dimana memiliki potensi tinggi namun kemampuan mengelola rendah. Dan Kuadran IV (sektor terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Reklama, Pajak Parkir dan Pajak BPHTB dimana sumber pajak memiliki potensi dan kemampuan mengelola rendah.

5.4.4 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2014

Dari hasil analisis Pendapatan Pajak daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka diperoleh hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7
Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan dengan Tipologi Klassen Tahun 2014

POTENSI KEMAMPUAN MENGELOLAH

Tinggi	KUADRAN I Sektor Unggulan (prima)	KUADRAN II Sektor Berkembang
		Pajak Penerangan Jalan
Rendah	KUADRAN III Sektor Potensial	KUADRAN IV Sektor Terbelakang
	Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak BPHTB Pajak BBPP
	Tinggi	Rendah

Hasil Pemetaan potensi pajak daerah Kota Kupang tahun 2014 untuk Kuadran I (sektor unggul) memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan mengelola rendah tidak ada pajak yang masuk dalam kuadran ini, dan Kuadran II (sektor berkembang) memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan mengelola rendah di tahun 2014 adalah Pajak Penerangan Jalan. Kuadran III (sektor potensial) adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah dimana memiliki potensi tinggi namun kemampuan mengelola rendah. Dan Kuadran IV (sektor terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Galian C, Pajak BPHTB dan Pajak BBPP yang baru dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang ditahun 2014 dimana sumber pajak memiliki potensi dan kemampuan mengelola rendah.

5.4.5 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015

Dari hasil analisis Pendapatan Pajak daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka diperoleh hasil bahwa Pemetaan potensi pajak daerah Kota Kupang tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan dengan Tipologi Klassen Tahun 2015

POTENSI KEMAMPUAN MENGELOLAH

Potensial		
	KUADRAN I	KUADRAN II
	Sektor Unggulan (prima)	Sektor Berkembang
Tinggi		
	KUADRAN III	KUADRAN IV
	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang
Rendah	Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak BPHTB Pajak BBPP
	Tinggi	Rendah

Hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan untuk Kuadran I (sektor unggulan) dimana potensi dan kemampuan pengelolaan tinggi tidak ada pajak yang masuk ditahun 2015. Kuadran II (sektor berkembang) dimana memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan

mengelola rendah juga tidak ada. Kuadran III (sektor potensial) adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah dimana memiliki potensi tinggi namun kemampuan mengelola rendah. Kuadran IV (sektor terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak BPHTB dan Pajak BBPP dimana sumber pajak memiliki potensi dan kemampuan mengelola rendah.

5.4.6 Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2015.

Berdasarkan hasil analisis potensi pajak daerah dengan teknik perhitungan pertumbuhan dan kontribusi yang di kombinasikan dalam analisis tipologi klassen pada tahun 2011-2015 ada dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9
Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan Dengan Tipologi Klassen, Tahun 2011-2015

POTENSI KEMAMPUAN MENGELOLAH

Potensial		
Tinggi	KUADRAN I Sektor Unggulan (prima)	KUADRAN II Sektor Berkembang
		Pajak Penerangan Jalan
	KUADRAN III Sektor Potensial	KUADRAN IV Sektor Terbelakang
Rendah	Pajak Restoran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak BPHTB Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Hotel Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak BBPP
	Tinggi	Rendah

Dari tabel diatas menunjukan bahwa sektor yang paling unggul atau prima yang masuk dalam Kuadran I tidak ada, Pada Kuadran II (sektor berkembang) dimana memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun kemampuan mengelola rendah hasil analisis lima tahun anggaran adalah Pajak Penerangan Jalan. Kuadran III (sektor potensial) adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Galian C dan Pajak Air Bawah Tanah dimana memiliki potensi tinggi namun kemampuan mengelola rendah. Dan Kuadran IV (sektor terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Reklama, Pajak Parkir dan Pajak BPHTB dimana sumber pajak memiliki potensi dan kemampuan mengelola rendah.

5.5 Hasil Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan Analisis Tipologi Klassen, dalam kaitannya dengan teori-teori yang menjadi landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu serta latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut : Dari hasil penelitian Analisi Tipologi Klassen dapat di simpulkan bahwa Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang masi tergolong rendah belum dioptimalkan dikarenakan Pajak yang di analisis selama lima tahun anggaran selalu berpindah tiap tahunnya, dari tiap kuadran belum ada jenis pajak yang masuk dalam Kuadran I atau menjadi Sektor yang unggul atau prima.

Khusus Kota Kupang analisis menggunakan potensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari latar belakang menggambarkan bahwa pajak daerah Kota Kupang selalu mengalami peningkatan namun hasil penelitian menggunakan analisis tipologi klassen menunjukan ditahun 2011 sumbangan jenis pajak yang masuk dalam Sektor Unggul (prima) adalah Pajak Penerangan Jalan, sumbangan jenis Pajak yang masuk dalam Sektor Berkembang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Pada Sektor Potensial jenis Pajak Daerah yang masuk ditahun 2011 tidak ada, lalu Sektor Terbelakang adalah Pajak Reklame dan Pajak Pengambilan Galian C dan pajak BPHTB.

Pada tahun 2012 sumbangan jenis pajak yang masuk dalam Sektor Unggul (prima) masi Pajak Penerangan Jalan dan, sumbangan jenis Pajak

yang masuk dalam Sektor Berkembang adalah Pajak Pengambilan Galian C, pada Sektor Potensial jenis Pajak Daerah yang masuk juga belum ada, lalu Sektor Terbelakang adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Parkir dan pajak BPHTB.

Pada tahun 2013 sumbangan jenis pajak yang masuk dalam Sektor Unggul (prima) tidak ada, sumbangan jenis Pajak yang masuk dalam Sektor Berkembang ditahun 2013 adalah Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Pajak Hiburan dan Pajak Pengambilan Galian C dan Pajak air Bawah Tanah. Di Sektor Potensial jenis Pajak Daerah juga tidak ada yang masuk dalam sektor ini, lalu Sektor Terbelakang adalah Pajak Reklame Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak BPHTB.

Pada tahun 2014 sumbangan jenis pajak yang masuk dalam Sektor Unggul (prima) dan Sektor Berkembang Pajak Penerangan Jalan. Di Sektor Potensial jenis Pajak Daerah yang masuk adalah Pajak Air Bawah Tanah, lalu Sektor Terbelakang adalah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan, pajak Reklame dan Pajak Pengambilan Galian C, Pajak Parkir, Pajak BPHTB dan Pajak BBPPP.

Di tahun 2015 berpindah sektro Unggulan atau prima tidak ada dan pada Sektor Berkembang adalah Pajak Parkir dan Sektor Potensial adalah Pajak Penerangan Jalan dan Sektor Terbelakang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Galian C Pajak BPHTB, Pajak BBPP dan Pajak Air Bawah Tanah.

5.6 Penelitian Terdahulu

Pembahasan hasil penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis secara deskriptif, selanjutnya dikaitkan dengan teori yang dipakai dalam penelitian dan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan. Hasil penelitian didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

Hasil penelitian Riyardi Dkk (2002) tentang potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Sukoharjo hasil penelitian menunjukkan Penarikan pajak dan retribusi daerah di Kota Sukoharjo yang dianalisis menggunakan lima tolak ukur pajak daerah yang telah diintrodusir oleh Nick Devas--*yield, ability to implement, equity, economic efficiency, dan suitability as a local source*-- maka diperoleh pokok-pokok pemikiran potensi pajak dan retribusi daerah, yang dilihat dari segi *yield* (hasil) semua pajak dan retribusi daerah di Kota Sukoharjo masih bisa ditingkatkan. Dan peningkatan tersebut tergantung dari *ability to implement* (kemampuan untuk melaksanakan), yang terlihat dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan *ability to implement* meningkat, maka *yield* juga akan meningkat. Pajak dan retribusi daerah yang tidak memiliki potensi adalah pajak galian tambang golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air, adapun dari segi *equity, economic efficiency, dan suitability as a local source*, seluruh pajak dan retribusi daerah memiliki potensi. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya tidak mengukur kemampuan birokrasi khususnya petugas pajak

dalam hal pengelolaan sumber pajak dalam menaikkan PAD, saya hanya melihat apakah sumber- sumber pendapatan masuk dalam kategori yang manan sesuai dengan pendekatan dengan analisis tipologi klassen. Kesamaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyardi Dkk 2002) sama sama ingin mengetahui potensi sumber pajak dalam meningkatkan PAD.

Azmi dan Halim (2013) tentang Analisis Upayah-Upayah Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bener Meriah Nangro Aceh Darusalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pajak daerah di Kota Bener Meriah dalam katagori terbelakang adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam, namun tidak ada pajak daerah yang teridentifikasi prima, potensial dan berkembang. Demikian halnya dengan retribusi daerah, yang teridentifikasi berkembang adalah; retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan, retribusi surat ijin usaha industri, tanda daftar industri dan ijin perluasan, serta retribusi surat ijin usaha perdagangan. Kota Bener Meriah tidak memiliki retribusi yang teridentifikasi prima dan potensial, selebihnya dengan katagori terbelakang dan belum teridentifikasi. Perbedaan antara penelitian saya dengan Azmi dan Halim (2013) mereka mengidentifikasi factor-faktor yang dapat mempengaruhi PAD. Kesamaannya yakni sama sama berkeinginan mencari peluang-peluang yang dapat meningkatkan PAD.

Dessy Ivony Mone (2015) dalam penelitiannya hasil pemetaan potensi pendapatan Asli Daerah khusus retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi pendapatan retribusi daerah dan pertumbuhan persumber pendapatan retribusi daerah dapat dikategorikan dalam sumber-sumber sektor unggul (prima), berkembang, potensial, dan terkelakang penerimaan retribusi daerah di Kota Rote Ndao mengalami perkembangan yang positif (berpotensi) sehingga perlu ditingkatkan penentuan target. Capaian realisasi penerimaan retribusi daerah menunjukkan trend yang berfluktuasi dimana jenis-jenis retribusi daerah yang diharapkan menjadi penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan penelitian saya dengan Mone 2011 bahwa sama-sama ingin mencari peta potensi PAD yang berbeda yakni alat analisisnya serta lokasi penelitian. Perbedaan penelitian saya berlokasi Di Kota Kupang sedangkan Penelitian yang dilakukan Mone berlokasi Di Kabupaten Rote Ndao.

Susanawati, Suparta dan Husaini (2014) tentang Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro, Hasil perhitungan pertumbuhan dilakukan berdasarkan analisis overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan analisis overlay pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, dan alat analisis penelitian ini menggunakan Alat analisis Overlay sedangkan penelitian saya menggunakan Analisis tripologi Klassen namun kesamaan

dalam analisis ini sama-sama memetakan dan mengelompokan suatu sektor.

Dalam Penelitian Kornelius Kalemur Kroon (2015) tentang Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemekaran dan Induk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hasil analisis tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan terhadap belanja daerah baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk berada di bawah 10%. Rata-rata Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 4,49% dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah 4,56%, sedangkan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat rata-rata 85,47% (tingkat ketergantungan yang tinggi). Dari hasil analisis potensi PAD menunjukkan bahwa terdapat tiga kabupaten pemekaran yang memiliki sumber PAD yang berada dalam kategori unggulan, sedangkan lima kabupaten pemekaran lainnya dan lima kabupaten induk tidak memiliki sumber PAD yang unggul. Sumber-sumber PAD yang unggul yakni Lain-lain PAD yang sah (Rote Ndao), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Manggarai Barat) dan Retribusi Daerah (Nagekeo). Rata-rata baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten induk memiliki sumber PAD yang berada dalam kategori potensial dan berkembang. Sedangkan analisis keadaan ekonomi menunjukkan bahwa secara umum tiap-tiap kabupaten induk memiliki keadaan ekonomi yang

lebih baik dari kabupaten pemekarannya masing-masing. Keadaan ekonomi yang lebih baik dari kabupaten pemekaran terdapat pada Kabupaten Lembata sedangkan kondisi perekonomian yang pembangunannya masih berjalan lambat terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Tengah. Untuk Kabupaten induk keadaan ekonomi yang lebih baik terdapat pada Kabupaten Ngada dan yang kurang baik terdapat pada Kabupaten Sumba Barat. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Analisis Tipologi Klassen, perbedaannya adalah data yang digunakan adalah seluruh PAD kabupaten dan kota seprovinsi NTT, sedangkan penelitian saya hanya menggunakan data pajak daerah Kota Kupang.

Kajian di perkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:48) Analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi ekonomi, sosiologi, budaya, germofologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia, Permodalan, dan peratruran perundangan yang yang membatasi.